

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN LOKAL

Diah Ayu Permata^{1*}, Sefti Ledya Devi², Setia Nisa³, Raizky Rienaldy Pramasha⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: diahayupermata01@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, regional, maupun lokal. Sehingga, untuk dapat memanfaatkan ruang dan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan, perlu pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik dari kawasan ini serta masyarakat yang mendiaminya. Ekonomi Biru menggambarkan kegiatan yang ramah lingkungan, terutama di bidang perikanan. Jika tidak ada konsep ini, pelaku usaha perikanan tidak akan melakukan tindakan yang sesuai dengan standar keamanan lingkungan. Selain itu, ide-ide yang dibawa oleh dinas kelautan dan perikanan akan membantu mengatasi konflik di sektor kelautan dan mendorong perkembangan perikanan. pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan adalah masalah keseimbangan antara perekonomian dan ekosistem kelautan, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan adanya hubungan timbal balik antara nelayan dan warga dan lingkungan sekitar. Konsep ini akan terwujud dalam pelaksanaan acara ini. Meningkatkan produktivitas, menjaga kesejahteraan nelayan, dan mempertahankan bumi biru di sektor kelautan membutuhkan ekonomi biru dari kelembagaan daerah.</i></p>	<p>Diajukan: 2-3-2024 Diterima: 21-5-2024 Diterbitkan : 25-05-2024</p> <p>Kata kunci: <i>Wilayah Pesisir, Ekonomi Biru, Kesejahteraan Masyarakat</i></p> <p>Keywords: <i>Coastal Areas, Blue Economy, Community Welfare</i></p>
<p>Abstract</p> <p><i>future in supporting national, regional and local economic development. Thus, to be able to utilize the space and resources of coastal areas optimally and sustainably, a deep understanding of the meaning and characteristics of this area and the people who inhabit it is needed. The Blue Economy describes environmentally friendly activities, especially in the fisheries sector. If this concept does not exist, fisheries business actors will not take actions that comply with environmental safety standards. In addition, the ideas brought by the maritime and fisheries service will help overcome conflicts in the marine sector and encourage fisheries development. Sustainable development in the marine sector is a matter of balance between the economy and marine ecosystems, fostering concern for the environment, and the existence of reciprocal relationships between fishermen and residents and the surrounding environment. This concept will be realized in the implementation of this event. Increasing productivity, maintaining the welfare of fishermen, and maintaining a blue earth in the marine sector requires a blue economy from regional institutions.</i></p>	
<p>Cara mensitasi artikel: Permata, D.A., Devi, S.L., Nisa, S., & Pramesha, R.R. (2024). Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 2(2), 380-390. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</p>	

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan sekitar 70% wilayah teritorialnya merupakan lautan, hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman alam laut yang potensial, baik hayati maupun non hayati, sehingga sudah seharusnya sektor kelautan sebagai penunjang perekonomian bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Permasalahan kemaritiman tidak hanya sekedar pengelolaan wilayah laut yang luas, karena laut merupakan bagian wilayah suatu negara yang sangat strategis dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar dan kecil, dengan luas daratan mencapai 1,9 juta km² dan luas perairan laut tercatat 7,9 juta km² serta garis pantai sekitar 81,791km (Suryanti, 2019). Bagi Indonesia, letak maritimnya mempunyai arti yang sangat penting dan strategis ditinjau dari aspek kewilayahan, keutuhan politik, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi nasional yang berbasis sumber daya kelautan.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Provinsi Lampung membutuhkan suatu bentuk pengelolaan yang tepat sehingga kelestarian sumberdaya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Namun, pada kenyataannya, konsep pengelolaan yang masih digunakan biasanya berfokus pada pengelolaan yang berbasis pemerintah, yang berarti otoritas dan dominasi pemerintah dalam mengendalikan sumber daya alam. Konsep pengelolaan menempatkan pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan tertinggi dan cenderung bersifat sentralistik. Akibatnya, peran komunitas lokal menjadi kurang penting, yang mengakibatkan pola pengelolaan yang tidak efisien, penangkapan berlebihan, kerusakan ekosistem, dan konflik kepentingan lainnya. Pengelolaan yang sentralistik juga akan membuat aturan menjadi lemah karena tidak terinternalisasi dalam masyarakat (Ruban, 2021).

Ekonomi biru merupakan model ekonomi baru yang mendorong penerapan perbaikan berkelanjutan dengan pola pikir serupa dengan ekosistem. Paradigma ekonomi biru mengajak kita untuk belajar dari alam dan menggunakan pertimbangan yang baik dari ekosistem dalam melakukan perbaikan. Konsep ini akan memastikan bahwa pembangunan yang dicapai tidak lagi hanya menghasilkan pertumbuhan moneter, namun juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin keberlanjutan, untuk memahami peningkatan sumber daya manusia guna mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, perlu diciptakan sumber daya manusia sebagai pelaku industri yang mampu meningkatkan biaya tambahan dan daya saing produk.

Konsep perbaikan moneter berkelanjutan menjadi inti dari perekonomian yang tidak berpengalaman, ekonomi hijau merupakan solusi untuk mengatasi dampak perubahan cuaca yang terjadi dengan tetap menyediakan listrik dan sumber daya alam tanpa merusaknya. Terdapat 3 alasan mendasar mengapa perbaikan keuangan harus berkelanjutan, yaitu (a) motif etis, zaman modern harus mampu menyediakan sumber daya alam bagi generasi mendatang; (b) alasan ekologis, kegiatan keuangan tidak merugikan atau mengancam sifat ekologis keanekaragaman hayati; dan (c) motif moneter berkelanjutan untuk mengukur kesejahteraan antargenerasi (Sofyaningrum dkk., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk melihat data dari publikasi sebelumnya yang berkaitan dengan cara Indonesia memanfaatkan sumber daya kelautan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Abstrak, pendahuluan, metode, dan hasil dari artikel original adalah fokus dari review literatur ini. Selain itu, data pendukung yang diambil dari situs web Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga disertakan untuk menunjukkan bahwa sumber data utama adalah yang paling penting. Sumber daya perikanan laut, SDGs, dan perikanan adalah kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel. Kriteria untuk artikel yang digunakan adalah sebagai berikut: a) Artikel harus diterbitkan antara tahun 2000-2023; b) Artikel harus berkaitan dengan studi ilmiah dengan topik utama potensi sumber daya perikanan laut; dan c) Artikel harus merupakan hasil penulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dasar konseptual pengembangan wilayah pesisir di Indonesia bersandar pada Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT), yang diilhami oleh *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM), pertama kali diusulkan pada Konferensi Pesisir Dunia (*World Conference of Coast*) pada tahun 1993, merupakan dasar untuk pengembangan wilayah pesisir Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengadopsi gagasan ini dan mengubahnya menjadi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007. Peneliti mengatakan bahwa ketika konsep dasar ICZM dibuat menjadi undang-undang, pemerintah Indonesia memasukkan dan mengakui aspek pengelolaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dengan nilai-nilai tersebut (Wardhana, 2020).

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, pendekatan pengelolaan pesisir melibatkan penggabungan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan). Untuk mencapai tujuan ini, keterpaduan perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup beberapa aspek, seperti keterpaduan ekologi, sektoral, kebijakan vertikal, disiplin ilmu, dan keterpaduan pihak yang berkepentingan.

Potensi Sumberdaya Alam Pesisir

Menurut Stani (2005), wilayah pesisir memiliki nilai strategis karena merupakan tempat peralihan antara ekosistem darat dan laut dan memiliki potensi sumber daya alam dan layanan lingkungan yang luar biasa. Kekayaan ini menarik banyak pihak untuk menggunakan sumberdayanya, mendorong berbagai lembaga untuk mengawasi pemanfaatannya.

Sumber daya alam, sumber daya buatan, dan jasa lingkungan yang ada di daerah pesisir disebut sebagai sumber daya pesisir. Sumber daya pesisir biasanya terbagi menjadi empat kategori: sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*), sumber daya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), energi kelautan, dan jasa lingkungan kelautan. Sumber daya yang dapat pulih termasuk berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan budidaya pantai dan laut. Salah satu potensi yang

dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan adalah ketersediaan lahan di pesisir. Perairan pantainya juga dapat dikembangkan untuk berbagai jenis pertanian, terutama pertanian laut. Mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi, dan gas adalah contoh sumber daya yang tidak dapat pulih.

Sebagai ekosistem yang selalu berubah, wilayah pesisir dan laut memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda. Ciri-ciri ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan wilayah ini secara komprehensif dan bijaksana. Secara biofisik, wilayah pesisir memiliki ciri-ciri berikut:

- a. Secara empiris, ada hubungan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di wilayah pesisir maupun antara wilayah pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas. Baik cepat atau lambat, perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir akan berdampak langsung atau tidak langsung pada ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dikelola dengan baik akan merusak struktur dan fungsi ekologis di wilayah pesisir dan laut.
- b. Biasanya, ada lebih dari dua jenis sumber daya alam dan layanan lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan di wilayah pesisir. Pengguna sumber daya alam sangat terkait langsung dengan proses dan fungsi lingkungan.
- c. Dalam suatu wilayah pesisir, biasanya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang masing-masing memiliki keterampilan, keahlian, dan preferensi untuk bekerja dalam berbagai pekerjaan, seperti petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri, dan kerajinan rumah tangga. Sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk mengubah kenikmatan bekerja (profesi) bagi sebagian besar orang yang sudah terbiasa dengan pekerjaan tertentu.
- d. Pemanfaatan monokultur (*single use*) suatu wilayah pesisir secara ekonomis dan ekologis sangat rentan terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Sumber daya pesisir umumnya merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*) yang dapat diakses oleh semua orang. Setiap sumber daya pesisir biasanya dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, wajar jika pencemaran akibat terlalu banyak eksploitasi sumber daya alam dan konflik pemanfaatan ruang sering terjadi di wilayah ini. Pada gilirannya, hal ini dapat menyebabkan tragedi publik.

Kawasan pesisir memiliki tiga habitat penting: terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Terdapat hubungan dan interaksi yang saling mempengaruhi di antara ketiga habitat tersebut. Kelangsungan hidup biota di habitat lain akan dipengaruhi oleh kerusakan di satu habitat, sehingga manajemen habitat harus mempertimbangkan kelangsungan hidup habitat lainnya.

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Pengelolaan sumber daya alam adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah ekosistem dengan cara yang akan memaksimalkan manfaatnya sambil memastikan kelestarian sumber daya dan kesinambungan produksi. Pengelolaan perikanan, terutama perikanan tangkap, harus benar-benar memperhatikan kekuatan

sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia. Secara khusus, jika sumber daya ikan laut yang hidup di wilayah perairan Indonesia dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab, sumber daya tersebut dapat menghasilkan produksi maksimum lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi sumber daya ikan di laut lepas. Namun, jika sumber daya ini dieksploitasi melebihi kapasitasnya, kelestarian sumber daya ikan akan terancam dan produksinya akan menurun.

Sumber daya ikan yang tersedia di beberapa lokasi penangkapan ikan di Pesisir Lampung telah digunakan melebihi kapasitasnya, mengancam kelestariannya. Dilaporkan bahwa beberapa spesies ikan sangat sulit ditemukan dan bahkan hampir hilang dari perairan Indonesia. Disebutkan juga bahwa ancaman ini diperkirakan akan meningkat dalam sepuluh tahun mendatang karena penangkapan armada perikanan di seluruh dunia telah beralih ke wilayah yang masih dapat diakses, termasuk perairan Indonesia, baik secara sah maupun tidak sah. Pada dasarnya, pengelolaan sumber daya alam pesisir adalah proses mengawasi tindakan individu atau masyarakat di sekitar wilayah pesisir agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian lingkungan. Sumber daya alam pesisir tidak dapat digunakan secara sembarangan dalam pengelolaan lingkungan, tetapi kita harus mempelajari sumber daya yang akan dikelola secara menyeluruh.

Dalam pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang beragam, baik di daratan maupun di lautan, harus dilakukan secara terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pengelolaan sumber daya alam pesisir dilakukan dengan mengembangkan tata ruang dengan mempertahankan kelestarian kemampuan dan daya dukung lingkungan yang ada. Secara ideal, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi ekologis untuk mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sumberdaya dan lingkungan hidup ikan (Alains et al., 2009).

Dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir, ada beberapa pertimbangan: ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pertimbangan ekonomi mencakup apakah aset lokal, nasional, atau internasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, apakah mereka menghasilkan barang yang dapat dipasarkan, dan apakah mereka adalah aset pariwisata yang dapat menghasilkan uang selain dari penjualan barang. Stabilitas fisik pantai, lingkungan masyarakat yang unik, ketersediaan stok hewan dan tumbuhan, termasuk yang dapat dimanfaatkan, pelestarian plasma nutfah, estetika, dan identitas budaya, serta apakah terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sedimentasi, konstruksi, pertanian, penebangan, penambangan, penangkapan berlebihan (*overfishing*), dan kontaminasi oleh limbah nutrien. Namun, pertimbangan sosial budaya mencakup pengakuan tradisi, nilai-nilai sosial budaya, dan pelestarian tradisi generasi.

Perencanaan pengelolaan yang sangat hati-hati diperlukan untuk memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sayangnya, belum ada informasi yang memadai tentang proses yang terjadi di pesisir dan lautan Indonesia untuk pemanfaatan yang bijaksana. Akibatnya, gagasan dan metode untuk mengelola perikanan pesisir dan lautan sebagian besar belum diuji. Selain degradasi lingkungan, ada beberapa masalah penting lainnya. Ini termasuk sistem hukum dan

penegakan hukum, partisipasi masyarakat yang lemah atau masih rendah, keamanan di laut, dan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing (Stani, 2005).

Pengembangan Pariwisata Pesisir

Tidak diragukan lagi, pariwisata bersinergi langsung pada masyarakat pesisir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai salah satu jenis usaha yang ramah lingkungan, pertumbuhan pariwisata memiliki banyak manfaat ekonomi dan sosial. Namun, jika tidak dikelola dengan tepat, pariwisata dapat memiliki dampak negatif. Sejak era *Millenium Development Goals* (MDG) dimulai pada tahun 2000, konsep pariwisata telah berkembang menjadi konsep ekologi wisata, yang dikenal sebagai ekowisata, dan "*Ecologi Village*", yang dikenal sebagai ekovillage. Kedua konsep ini dikemas dan bersifat natural dengan mengandalkan keanekaragaman hayati yang tinggi, keunikan bentang alam, dan metode tradisional masyarakat untuk mengelola sumber daya alam.

Sektor pariwisata yang berbasis ekologi dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat sebagai objek tentu saja harus berhubungan positif dengan terjaganya kondisi ekologi, lingkungan hidup dan menjaga tatanan sosial yang bersifat kelokalan. Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur pariwisata hendaknya memperhitungkan sekecil mungkin dampak kerusakan ekologi dan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah-limbah akibat tingginya jumlah kunjungan pariwisata harus dikelola dengan baik, begitu juga area potensial yang akan menjadi calon destinasi dan destinasi *existing* pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil, haruslah dijaga dari kerusakan dan penggunaan sumber daya alam dalam skala besar yang mengancam ekologi dan ekosistem. Para pihak pemangku kepentingan sektor pariwisata saat ini sudah mulai memberikan atensi terhadap pengembangan dan penerapan ekowisata dan *ecovillage* dengan membangun industri pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat, prinsip konservasi sumber daya alam, pendidikan, rekreasi dan peningkatan ekonomi.

Dengan mengambil studi di Provinsi Lampung, ada beberapa hal yang menjadi kendala atau tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah pesisir, di antaranya adalah: Pertama, minimnya anggaran yang diberikan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, fasilitas umum, dan promosi pariwisata. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pariwisata, hal ini mempengaruhi kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan. Ketiga, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kurangnya kualifikasi dan keahlian pegawai terkait dapat mempengaruhi kinerja pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Keempat, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pariwisata dapat menyebabkan kegagalan dalam pengembangan pariwisata, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata. Kelima, keterbatasan informasi yang tersedia tentang potensi wisata di Lampung dapat mengurangi kunjungan wisatawan, *visitor centers* yang tidak berstandar internasional juga memberikan persepsi buruk bagi wisatawan. Keenam, kurangnya promosi efektif program pariwisata yang masih perlu ditingkatkan, kegiatan promosi seperti pameran pariwisata, festival budaya, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan perlu dilakukan (Liliani, 2023).

Pengembangan Masyarakat Lokal

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang mereka hadapi atau miliki, masyarakat agraris memiliki

sumber daya yang terkontrol, yaitu lahan untuk memproduksi komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. Dengan demikian, sifat-sifat ini memungkinkan tetap di lokasi produksi, yang menghasilkan mobilitas usaha yang lebih rendah dan faktor resiko yang lebih kecil (Stani, 2005). Pengembangan masyarakat lokal juga merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata guna meningkatkan perekonomian, masyarakat lokal dapat menjadi bagian dari industri pariwisata, seperti dengan membuka usaha homestay, menjual souvenir, atau menjadi pemandu wisata. Dengan pengelolaan pariwisata dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat lokal, hal inilah yang dihadapi Kabupaten Lampung barat dalam rangka pengembangan maupun peningkatan pengelolaan destinasi wisata adalah kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Pelatihan telah diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat.

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal

Masyarakat pesisir sebenarnya telah lama menekuni pekerjaan sebagai nelayan tangkap, karena kondisi alam yang memberikan banyak kemudahan untuk mencari ikan, pekerjaan ini telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat pesisir. Dengan bermodalkan jala dan jaring para nelayan dapat membawa pulang hasil tangkapan ikan, namun akhir-akhir ini banyak nelayan yang beralih menjadi petani rumput laut karena biaya operasional sebagai nelayan semakin tinggi, sehingga hasil tangkapan mereka seringkali tidak dapat memenuhi biaya.

Karena nilai jual rumput laut yang tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, beberapa masyarakat pesisir juga memilih menjadi petani rumput laut. Akses jalan yang rusak dari kota juga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menjual ikan segar. Selain itu, hasil tangkapan nelayan dapat melimpah sehingga harga turun. Ini adalah tempat hukum pasar berfungsi, di mana harga ditentukan oleh supply dan demand. Ibu-ibu nelayan dapat memanfaatkan hasil tangkapan yang melimpah untuk mengolah ikan menjadi berbagai macam olahan yang menguntungkan. Ibu-ibu nelayan tidak dapat memanfaatkan peluang bisnis ini karena masalah sumber daya manusia.

Pengolahan ikan asin merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Lampung. Selain berdampak pada ekonomi, pengolahan ikan asin juga memiliki dampak sosial, antara lain menjaga kearifan lokal dalam hal tradisi pengolahan hasil laut, serta memperkuat ikatan sosial di kalangan masyarakat melalui kegiatan bersama dalam pengolahan ikan asin.



Gambar 1 Hasil Tangkapan Ikan oleh Nelayan di Pesisir Lampung



Gambar 2 Petani Rumput Laut



Gambar 3 Olahan Ikan Asin guna meningkatkan Nilai Jual yang lebih Tinggi

Kreativitas masyarakat pesisir sering kali muncul sebagai hasil dari adaptasi terhadap lingkungan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Di berbagai wilayah pesisir, termasuk Lampung, masyarakatnya dikenal memiliki banyak kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya laut serta mengembangkan berbagai produk yang berkaitan dengan lingkungan pesisir. Kreativitas masyarakat pesisir tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, masyarakat pesisir mampu menciptakan produk bernilai ekonomi yang tidak hanya diminati di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Inovasi ini berperan penting dalam menjaga keberlanjutan hidup masyarakat pesisir, sekaligus melestarikan kekayaan alam dan budaya setempat.



Gambar 4 Hasil Kerajinan Tangan Masyarakat Pesisir

Statistik Pendapatan Nelayan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan nelayan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. Analisis pendapatan nelayan menunjukkan bahwa pendapatan bersih mereka, yang dihitung dari total penerimaan dikurangi biaya operasional, sangat bervariasi tergantung pada jenis alat tangkap, pengalaman, dan jumlah anggota kru. Hasil tangkapan nelayan sangat memengaruhi kesejahteraan mereka. Pendapatan mereka meningkat jika hasil tangkapannya bagus dan sebaliknya. Selain itu, ada banyak faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan, seperti faktor ekonomi, seperti besarnya biaya, jumlah perahu, jumlah tenaga kerja, jarak tempuh, dan pengalaman. Selain itu, faktor produksi, seperti waktu melaut, pengalaman, teknologi, dan pendapatan nelayan, juga sangat penting. Harga

bahan bakar yang tinggi, sumber daya yang terkuras, dan harga ikan sebagai output perikanan tangkap adalah beberapa masalah yang memengaruhi pendapatan nelayan (Ivan & Sri Utami, 2023).

Sisi menarik dari kehidupan nelayan yang perlu diteliti, yaitu aspek sosial ekonomi mereka. Meskipun nelayan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan internasional, sebagian besar dari mereka masih hidup miskin dengan pendapatan yang rendah. Ini adalah masalah utama sektor perikanan tangkap yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat. Selain penggunaan teknologi yang memengaruhi pendapatan nelayan, penelitian yang dilakukan pada beberapa komunitas nelayan di luar negeri menunjukkan bahwa organisasi sosial ekonomi dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Mengambil contoh dari bagaimana organisasi sosial ekonomi membantu kehidupan nelayan di luar negeri dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan daerah.

Permasalahan yang juga sering dialami oleh nelayan Indonesia adalah minimnya pendapatan yang mereka peroleh. Sampai saat ini, masalah ini masih belum terselesaikan. Kekurangan modal nelayan menyebabkan masyarakat nelayan menjadi miskin. Sejauh yang kita ketahui, dalam teori faktor produksi jumlah output artinya berhubungan dengan pendapatan bergantung pada modal kerja, pengalaman kerja, dan lamanya waktu melaut.

Table 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)- BPS

Jenis Perairan	Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Lampung (Ton)		
	(2018)	(2019)	(2020)
Perairan Laut	142.969	159.916	141.992

Hasil tangkapan ikan di Provinsi Lampung dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018, total hasil tangkapan mencapai 142.969 ton, mencerminkan kinerja yang baik dalam sektor perikanan. Namun, pada tahun berikutnya 2019, hasil tangkapan meningkat menjadi 159.916 ton, menunjukkan tren positif dan peningkatan produktivitas nelayan. Sayangnya, pada tahun 2020, hasil tangkapan mengalami penurunan kembali menjadi 141.992 ton.

Penurunan hasil tangkapan di tahun 2020 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, penangkapan berlebihan, dan dampak dari pandemi COVID-19 yang mungkin mempengaruhi aktivitas perikanan dan distribusi hasil tangkapan. Meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah tangkapan, data ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di Lampung memiliki potensi yang besar namun juga menghadapi tantangan yang perlu ditangani untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan produksi di masa depan. Upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, secara keseluruhan, hasil tangkapan selama periode ini tidak stabil dan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Penurunan hasil tangkapan tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan nelayan tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal yang bergantung pada sektor perikanan. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan agar hasil tangkapan dapat meningkat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat nelayan di Lampung.

Pengelolaan perikanan adalah upaya penting untuk menjaga kesinambungan sumber daya. Selain itu, pengelolaan perikanan tidak hanya berfokus pada generasi saat ini, tetapi juga menjamin bahwa sumber daya perikanan Indonesia akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengelolaan perikanan Provinsi Lampung saat ini masih menghadapi banyak masalah yang membuatnya belum sepenuhnya menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan beberapa model kebijakan pengelolaan perikanan yang berbasis pada keberlanjutan dan kemakmuran sebagaimana di uraikan berikut ini:

a. Pengelolaan berbasis Masyarakat

Konsep ini muncul karena pemerintah dianggap tidak mampu mengelola sumber daya dengan baik. *Community Based Fisheries Management (CBFM)* adalah salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam, seperti perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolannya. Strategi ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya alam berada di tengah-tengah masyarakat. Sistem pengelolaan ini memberikan masyarakat kesempatan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat sendiri yang menentukan kebutuhan, tujuan, dan aspirasinya, dan masyarakat juga yang membuat keputusan untuk kesejahteraan mereka sendiri.

b. *Co-Manajemen*

Pemerintah dan masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dari perencanaan hingga pengawasan, menurut model co-management. Co-management adalah jenis manajemen yang mampu mengimbangi kepentingan masyarakat dan pengguna lainnya. Dengan kata lain, co-management berarti pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, dan lain-lain. Dalam konsep co-management, masyarakat lokal bekerja sama dengan pemerintah dan pihak lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Oleh karena itu, bentuk pengelolaan sumber daya alam yang berkolaborasi terdiri dari kombinasi dari dua pendekatan utama: pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (pengendalian sentral) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (pengendalian berbasis komunitas) (Alains dkk., 2009).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya laut yang efektif dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui peningkatan produksi perikanan, industri terkait, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Kesadaran masyarakat dan ilmuan serta pemerintah untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati semakin gencar dilaksanakan, kearifan lokal merupakan bukti perhatian masyarakat menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu, pengelolaan berbasis kearifan lokal seperti sasi dapat menjaga keseimbangan sumber daya alam dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hubungan antara pendapatan nelayan dengan perkembangan perekonomian masyarakat dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya pendapatan maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat, artinya semakin tinggi pendapatan nelayan maka semakin tinggi pula akumulasi tabungan

masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan sumber daya laut, sehingga berdampak positif pada perekonomian lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alains, A. M., Putri, S. E., & Haliawan, P. (2009). Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (Pspbm) Melalui Model Co-Management Perikanan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 10, Nomor 2).
- Ivan, E., & Sri Utami, E. (2023). Analysis of Production and Fisher's Fishing Income in Muara Gading Mas, Labuhan Maringgai, East Lampung. Dalam *Jurnal TROFISH* (Vol. 2, Nomor 2).
- Liliani, D. (2023). Ikatan Sosiologi Indonesia Malang Raya Dan Sekitarnya Analisis Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. Dalam *JSL Jurnal Socia Logica* (Vol. 3, Nomor 1).
- Ruban, A. (2021). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Berbasis Kearifan Lokal Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Coastal And Marine Resources Management Based Local Wisdom At The Haruku Village In Central Maluku District. *Jurnal IPTEKS PSP*, 8(2), 70.
- Stani, S. (2005). *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Sofyaningrum, R., Maulana, A. I., Sistiyaningrum, K., & Alfian, F. (2023). Blue Economy and Green Economy: Ecocritical Study of Kompas Short Stories Collection Keluarga Kudus. *SUAR BETANG*, 18(1), 105-121. <https://doi.org/10.26499/surbet.v18i1.475>
- Suryanti, S. & S. A. (2019). *Diterbitkan oleh: Undip Press Semarang*.
- Wardhana, I. (2020). *Pengelolaan Wilayah Dan Sumber Daya Pesisir Terintegrasi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur; (Sebuah Telaah Kritis)*. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>